

KONFLIK ANTAR KELAS MASYARAKAT BUTON DESA SAMPUABALO DAN DESA GUNUNG JAYA KECAMATAN SIOTAPINA KABUPATEN BUTON

^{1*)}Laode Arupalaka, ²⁾Laode Dirman, ³⁾La Aso

Program Studi Kajian Budaya, Pascasarjana Universitas Halu Oleo Kendari Jurusan
Tradisi Lisan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo Kendari
Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo Kendari

*Corresponding Author: La Ode Arupalaka (oputasangia@rocketmail.com)

Abstrak: Konflik yang terjadi di Kabupaten Buton telah dipicu oleh permasalahan kecil seperti adanya keadaan yang saling menghina, saling mengejek antar remaja, perbedaan pendapat dan penggolongan sosial. Penggolongan sosial yang dimaksud adalah adanya perbedaan antara masyarakat yang merupakan keturunan kaum bangsawan dan masyarakat non bangsawan pada masa pemerintahan kesultanan Buton. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya konflik antar kelas masyarakat Buton Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan apa yang menjadi akar masalah konflik. Dalam menganalisis data teori yang digunakan adalah Teori Fungsional Coser dan Interaksi Sosial Pierre Felix Bourdieu tentang Habitus, Modal dan Ranah untuk menganalisis akar masalah penyebab terjadinya konflik antar kelas masyarakat Buton Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengamatan/observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi, study document. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Akar masalah konflik antar kelas masyarakat Buton Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton disebabkan oleh beberapa factor, yaitu: (1) historis kedua desa yang berbeda kelas sosial (bangsawan dan non bangsawan), (2) konflik individu dan kelompok yang berkelanjutan, (3) faktor pendidikan, (4) faktor identitas, (5) penanganan konflik yang tidak tuntas, (6) konflik laten, (7) disfungsi lembaga adat dalam masyarakat., dan (8) kurangnya lapangan kerja.

Kata kunci: Konflik, Kelas Masyarakat, Kabupaten Buton

Abstract: The conflict occurred at Buton Regency was triggered by small problems such as insulting each other, mocking each other between teenagers, differences of opinion, and social class. The social classification is about the difference between people who are descendants of nobility and non-noble people during the reign of the sultanate of Buton. The objective of this study is to describe the causes of conflict intra society classes of Butonese, Sampuabalo Village and Gunung Jaya Village, Siotapina District of Buton Regency by using a qualitative descriptive approach to describe what are the background

of the conflict problem. In analyzing the theoretical data it was used the Functional Theory of Coser and Pieree Felix Bourdieu's Social Interaction about Habitus, Capital and Domain to analyze the root causes of class conflict in the Buton community, Sampuabalo Village and Gunung Jaya Village, Siotapina District of Buton Regency. This research uses a qualitative approach. There are two types of data used in this study, namely primary data and secondary data. Collecting data in this study were done by using observation technique, interviews technique, and document study. Based on the results of data analysis, the results of this study showed that: The background of the problem of conflict intra society classes of the Butonese, Sampuabalo Village and Gunung Jaya Village, Siotapina District of Buton Regency were caused by several factors, namely: (1) the history of the two villages with different social classes (aristocrat and non-aristocracy), (2) ongoing individual and group conflicts, (3) educational factors, (4) identity factors, (5) incomplete conflict handling, (6) latent conflicts, (7) dysfunction of traditional institutions in society, and (8) lack of employment.

Keywords: *Conflict, Society class, Buton Regency*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi potensi konflik yang tinggi antar elemen pembentuk multikulturalisme. Konflik etnik sebagai konflik dengan karakter tertentu disebabkan oleh berbagai faktor sosial ekonomi (Adhani, 2014; Nasution, 2014). Faktor sosial ekonomi yang dicerminkan dengan kondisi saling mengklaim dalam menguasai sumberdaya yang terbatas dan kecemburuan sosial yang bersumber dari kepentingan ekonomi antara kaum pendatang dengan penduduk asli. Selain itu, faktor sosial budaya yang dicerminkan dengan dorongan emosional kesukuan yang melahirkan kefanatikan dan sentimen antar suku dan antar pemeluk agama. Konflik merupakan fenomena yang selalu melekat dalam kehidupan masyarakat, sebagai realitas yang tidak dapat dihindarkan dan akan selalu dan terus terjadi (Nasikun dalam Nulhakim, 2017:76). Konflik akan terus terjadi baik pada tataran individu maupun tataran kelompok dalam masyarakat (Putra, 2014). Menurut De Dreu & Gelfand (2007) konflik merupakan proses yang mulai ketika individu atau kelompok

memperspsi terjadinya perbedaan atau oposisi antar dirinya dengan individu atau kelompok lain mengenai minat dan sumber daya, keyakinan, nilai atau praktik-praktik lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Ward et al., (2010) mengenai teori konflik Dahrendrof melihat masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, pertikaian dan konflik dalam sistem sosial serta melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. Segala keteraturan yang ada dalam kehidupan masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada diatas dengan menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan kedamaian dalam masyarakat (Binns, 2020).

Berdasarkan beberapa konsep mengenai konflik yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konflik sosial adalah suatu situasi proses interaksi antara dua kelompok atau lebih dalam memperebutkan objek yang sama demi kepentingan masing- masing. Salah satu yang terjadi dalam konflik masyarakat adalah konflik antar kelas sosial. Konflik antar kelas sosial merupakan konflik akulturasi masyarakat yang memiliki latar

belakang sosial yang berbeda, masing-masing memiliki egosentrisme terhadap kelompoknya sehingga menyebabkan terjadinya konflik seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Buton.

Konflik yang terjadi di Kabupaten Buton telah dipicu oleh permasalahan kecil seperti adanya keadaan yang saling menghina, saling mengejek antar remaja, perbedaan pendapat, dan peggolongan sosial. Peggolongan sosial yang dimaksud adalah adanya perbedaan antara masyarakat yang merupakan keturunan kaum bangsawan dan masyarakat yang non bangsawan pada masa pemerintahan kesultanan Buton. Pada dasarnya konflik tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena konflik itu sendiri merupakan salah satu unsur perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Konflik sosial adalah konflik karena akibat dari adanya interaksi sosial yang tidak seimbang antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Apabila konflik dapat dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan begitupun sebaliknya apabila konflik tidak dikelola dengan baik, maka yang terjadi adalah kerugian bagi kehidupan bermasyarakat.

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyebab konflik antar kelas masyarakat Buton Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, landasan pemikiran secara teoritis menggunakan konsep stratifikasi sosial, dimensi stratifikasi sosial dan kajian definisi konflik itu sendiri. Konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belakanginya (Firdaus et al., 2015; Hikam, 2018). Kondisi tersebut, yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik. Sumber terjadinya konflik dapat dipicu oleh tiga faktor, yaitu: komunikasi, struktur, dan

variable pribadi. Pada penelitian ini pembahasan menggunakan teori praktik sosial Bourdieu dan Teori Fungsional Coser. Teori ini digunakan untuk menganalisis, menjelaskan, dan memprediksi suatu objek tertentu (Neuman, 1991).

Teori fungsionalisme atau dikenal sebagai teori fungsional struktural adalah teori yang menyatakan semua aspek masyarakat tergantung dan mereka melayani suatu fungsi sedangkan Teori Praktik Sosial menggunakan kerangka berfikir (paradigmatik) yang diintrodusir oleh Pierre Felix Bourdieu tentang habitus x modal ditambah ranah/medan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengamatan/observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi. Study document. Pengamatan (observation) dilakukan untuk mengetahui keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Wawancara (*interview*) dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan, dan setelah mendapatkan informasi kemudian dilakukan dokumentasi dalam bentuk buku, arsip, Dokumen adalah tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan. Analisis data, penelitian menggunakan model analisis Miles et al., (2014) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan maka ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik antar kelas masyarakat Buton Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, yaitu sebagai berikut.

1. Faktor Historis

Secara historis pada masa pemerintahan kesultanan, Buton penduduk Desa Sampuabalo merupakan keturunan kaum bangsawan. Status sosial bangsawan bukan sebagai kebanggaan semu setiap individu dan kelompok saja namun pada prakteknya melekat dan sangat dominan berkembang dikalangan masyarakat Desa Sampuabalo. Hal ini menghasilkan sentrisme individu dan kelompok sehingga perasaan egois dan fanatisme berlebihan tersebut membuat individu dan kelompok lain seolah menjadi kelompok yang termarginalkan. Dalam konteks teori dapat diartikan sebagai suatu simbolik dari modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sampuabalo. Modal dalam pengertian Bourdieu sangatlah luas karena mencakup: modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik digunakan untuk merebut dan mempertahankan perbedaan dan dominasi (Harker et al., 2009).

Pada masa sekarang kelompok yang termarginalkan yang diidentikkan dengan etnik Laporo telah mengalami perubahan status sosial ekonomi kearah yang lebih baik, maju dan modern yang disebabkan oleh karena perubahan paradigma pemerintahan yaitu dari sistem pemerintahan kesultanan kedalam struktur pemerintahan Republik dan hal ini menjadi situasi yang transisional bagi penduduk Lipu Mangau (etnik Laporo). Penduduk Lipu Mangau yang tadinya seolah termarginalkan telah mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan

serta mendapatkan hak-hak kesetaraan golongan maupun strata sosial lainnya. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan stratifikasi sosial yang membentuk kebiasaan/habitus masyarakat kedua desa. Menurut Bourdieu habitus merupakan suatu sistem melalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal, disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik- praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif (Fatmawati, 2020) mengacu pada teori praktik sosial Bourdieu bahwa masyarakat Desa Sampuabalo telah terbentuk oleh habitus dengan status kaum bangsawan sedangkan masyarakat Desa Gunung Jaya terbentuk oleh Habitus status sosial non bangsawan.

2. Faktor Masalah Individu dan Kelompok

Akulturasi masyarakat yang memiliki latar belakang sosial berbeda dimana masing-masing memiliki egosentrisme terhadap kelompoknya itulah yang menyebabkan terjadinya konflik. Konflik yang terjadi di Desa Sampuabalo dan Desa Gunung jaya, cenderung dipicu oleh permasalahan- permasalahan kecil, yang berlangsung hampir setiap tahun tanpa adanya penyelesaian dari pihak aparat yang berwenang (kepolisian). Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Sampuabalo dan Desa Gunung jaya memiliki kecenderungan bahwa masyarakat“ terprovokatif” oleh kondisi yang tidak terkendali dari bentrok antar anak sekolah yang kemudian bias dan berkembang kepada kerusuhan masa yang lebih besar. Kecemburuan sosial antara kaum keturunan bangsawan dan non bangsawan menjadi lebih dominan. Perwujudan kecemburuan sosial tersebut adalah berupa kalimat-kalimat ejekan, atau hinaan satu sama lainnya. Pada situasi ini perbedaan tingkatan antara golongan satu

dengan golongan yang lainya menjadi lebih nyata. Strata ekonomi masyarakat menjadi simbol penguasaan individu atau kelompok yang lebih kuat. Sentrisme kelompok menjadi tidak sehat dan cenderung mengarah pada suatu pertentangan individu atau kelompok. Pada akhirnya konflik telah mencapai klimaks saat pelaksanaan takbir keliling yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Desa Sampuabalo. Pelaksanaan takbir keliling yang menggunakan suara knalpot motor racing dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Masyarakat yang merasa terganggu dengan suara motor racing tersebut kemudian melakukan pelemparan batu. Akibat pelemparan batu tersebut mendapatkan reaksi yang keras dari pemuda Desa Sampuabalo, sehingga semakin memicu kemarahan masyarakat Desa Smpuabalo terhadap masyarakat Desa Gunung Jaya maka terjadilah kerusuhan besar tersebut.

3. Faktor Pendidikan

Masalah Pendidikan juga berdampak terhadap kejahatan tawuran atau perkelahian kelompok antar warga Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya. Menurut Harefa (2021) faktor penyebab terjadinya tindak kriminal adalah minimnya ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki tidak memadai, sehingga orang tersebut akan melakukan tindakan yang bodoh yang menjurus kearah kriminal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa beberapa pelaku bentrok adalah anak-anak remaja yang tidak bersekolah yang hanya sekolah sampai SD dan SMP sehingga mereka kurang paham mengenai norma, moral, agama dan lingkungan.

4. Faktor Ketidakpuasan Hukum dalam Masyarakat

Penanganan dan penyelesaian setiap kasus yang tidak pasti dan

berlarut-larut oleh pihak kepolisian menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan dan tidak mendapat kepastian hukum maupun ganti rugi semakin tidak percaya dengan penyelesaian kasus oleh aparat penegak hukum, apalagi perselisihan juga tidak diselesaikan melalui jalur non litigasi. Konflikpun timbul tenggealam begitu saja tanpa adanya kata mufakat antara kedua bela pihak sampai terjadi konflik berikutnya. Situasi dan kondisi konflik seperti ini terus berlanjut yang pada akhirnya menjadi konflik laten.

5. Faktor Konflik Laten

Konflik laten yang dimaksud adalah dendam yang ditimbulkan akibat penyelesaian masalah yang tidak selesai. Walaupun konflik tersebut selalu dapat diredam oleh para elit masyarakat maupun aparat penegak hukum namun tidak pernah selesai sehingga menjadi dendam individu dan kelompok ditambah dengan adanya perasaan akan status sosial yang melekat pada masing- masing individu dan kelompok masyarakat inisangat mendominasi interaksi sosial di kedua desa.

6. Faktor Identitas Sosial

Secara umum masyarakat Buton dibentuk oleh identitas atau karakter habitus periode masa pemerintahan kesultanan Buton. Penghargaan terhadap nilai-nilai leluhur, adat istiadat dan rasa kepatuhan terhadap norma-norma masa lalu masih melekat sampai dengan sekarang. Penduduk Desa Sampuabalo merupakan suatu gambaran kecil dari masyarakat Buton yang masih memiliki rasa bangga dan kepatuhan terhadap nilai-nilai leluhurnya. Nilai-nilai leluhur yang memiliki identitas strata sosial lebih tinggi telah membentuk habitus masyarakatnya memiliki fanatisme nilai

yang berlebihan. Berdasarkan teori Bourdieu nilai-nilai ini dapat menjadi simbolik modal sosial bagi masyarakat yang memiliki perasaan lebih terhormat dari etnik lain yang memiliki status sosial lebih rendah.

Perubahan status sosial ekonomi etnik Laporo seperti kekayaan, jabatan dalam pemerintahan dan penguasaan sumber daya ekonomi lainnya telah memunculkan sentimen sosial baru dalam kehidupan sehari-hari terutama dikalangan pemuda dan anak sekolah. Hal inilah yang membuat masyarakat Desa Gunung Jaya merasa lebih memiliki modal simbolik dalam kehidupan sosialnya. Akulturasi sosial budaya klasik masa kesultanan Buton dan sosial budaya modern ini telah menyebabkan perbedaan interaksi sosial antar individu maupun antar kelompok masyarakat. Masyarakat Desa Sampuabalo yang memiliki modal sosial kaum bangsawan dihadapkan pada keadaan masyarakat Desa Gunung Jaya sekarang yang memiliki modal simbolik berupa status keamanan dalam ekonomi, politik, maupun jabatan dalam sistim pemerintahan telah memunculkan perbedaan-perbedaan dikalangan pemuda dan bahkan masyarakat. Menurut Bourdieau akulturasi status sosial yang berbeda ini menjadi ranah potensial terjadinya konflik yang berkelanjutan.

7. Faktor Disfungsi Sosial Budaya

Kebudayaan berfungsi membentuk keteraturan kehidupan sosial dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Adanya fungsi lembaga adat yang sudah ditinggalkan atau seolah tidak berjalan sebagaimana mestinya telah menyebabkan masyarakat mengalami krisis ketokohan. Lembaga adat yang dapat mengatur pelaksanaan hukum-hukum tradisional tidak memiliki ranah/ruang dalam kehidupan sosial masyarakat Buton.

lembaga adat hanya berfungsi sebatas seremonial acara budaya seperti acara perkawinan dan hukum-hukum adat perkawinan lainnya. Lembaga adat yang seharusnya berfungsi membantu keteraturan dan ketertiban dilingkungan masyarakat tradisional terabaikan begitu saja. Setiap permasalahan dalam masyarakat seolah dapat diselesaikan oleh Kepala Desa namun faktanya tidak bisa terlaksana dengan baik. Hukum adat yang pernah adapada masa pemerintahan kesultanan Buton terabaikan oleh arus globalisasi dan modernisasi. Konflikpun selalu berulang dan berkelanjutan tanpa adanya penyelesaian.

8. Kurangnya Lapangan Pekerjaan

Keterbatasan ketersediaan lapangan kerja, tingginya angka pengangguran dikedua desa menjadi suatu permasalahan serius yang akan mengarah pada tindakan kriminalitas. Pengangguran menjadi beban psikis dan psikologis seperti tekanan emosi dan pikiran yang tidak stabil bagi yang menganggur dan keluarganya (Harefa, 2021). Ikawati mengatakan bahwa para penganggur akan memiliki perasaan tidak enak dengan keluarga dan lingkungannya, ada perasaan malu, serba salah, beban moral, merasa tidak berguna, kurang percaya diri, mudah tersinggung, dan tertekan karena tuntutan orang tua dan keluarga. Para penganggur akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tidak sedikit dari para pengangguran yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma dan hukum demi memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti tindakan kejahatan atau kriminalitas. Sementara dihadapkan pada kondisi anak muda Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya relatif tidak memiliki kemampuan untuk berwirausaha sedangkan usaha di

bidang pertanian dan nelayan semakin dihindari karena dianggap kurang prestise serta kurang menghasilkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa akar masalah yang melatarbelakangi konflik antar kelas masyarakat Buton Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton adalah:

1. Historis kedua desa yang berbeda kelas sosial (bangsawan dan non bangsawan). Struktur obyektif yang berbeda dapat membentuk sejarah personal dari masyarakat kedua desa, yaitu Desa Sampuabalo yang dibentuk oleh habitus masyarakat kaum bangsawan dan Desa Gunung Jaya yang dibentuk oleh habitus non bangsawan. Akulturasi modal simbolik yang berbeda menjadi ranah potensial terjadinya konflik sosial.
2. Konflik individu dan kelompok yang berkelanjutan, dimana akulturasi masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi yang berbeda telah menyebabkan interaksi sosial yang tidak seimbang, adanya individu maupun kelompok yang saling mengejek, menghina satu sama lain yang kemudian menjadi konflik, beberapa konflik yang tidak selesai menjadi bias karena masyarakat yang lain cenderung terprovokasi.
3. Faktor pendidikan. Fakta penelitian telah ditemukan beberapa oknum yang terlibat kerusuhan hanya tamatan SD maupun SMP saja Menurut Harefa (2021) faktor penyebab terjadinya tindak kriminal adalah minimnya ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki tidak memadai, sehingga orang tersebut akan melakukan tindakan yang bodoh yang menjurus kearah kriminal.
4. Faktor identitas. Masyarakat kedua desa memiliki identitas kelas sosial yang berbeda, masyarakat Desa sampuabalo merupakan representasi kelas sosial era kesultanan Buton sedangkan Masyarakat Desa Gunung Jaya adalah representasi era modern berupa penguasaan sumber daya ekonomi, politik maupun jabatan dalam pemerintahan.
5. Penanganan konflik yang tidak tuntas. Penanganan dan penyelesaian setiap kasus yang tidak pasti dan berlarut-larut oleh pihak kepolisian menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat
6. Konflik laten. Beberapa kejadian konflik yang tidak mendapatkan kepastian hukum telah menyebabkan dendam oleh individu dan kelompok tertentu yang kemudian akan muncul menjadi konflik manifest bila terjadi kesalahpahaman.
7. Disfungsi lembaga adat dalam masyarakat. Lembaga adat yang dapat mengatur pelaksanaan hukum- hukum tradisional tidak memiliki ranah/ruang dalam kehidupan sosial masyarakat Buton. lembaga adat hanya berfungsi sebatas seremonial acara budaya seperti acara perkawinan dan hukum-hukum adat perkawinan lainnya.
8. Kurangnya lapangan kerja., Keterbatasan ketersediaan lapangan kerja, tingginya angka pengangguran dikedua desa menjadi suatu permasalahan serius yang akan mengarah pada tindakan kriminalitas. Pengangguran menjadi beban psikis dan psikologis seperti tekanan emosi dan pikiran yang tidak stabil bagi yang menganggur dan keluarganya (Harefa,

2021)

Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 18–21.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, Y. (2014). Konsep Pendidikan Multikultural Sebagai Sarana Alternatif Pencegahan Konflik. *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(1), 111–121.
- Binns, R. (2020). On the apparent conflict between individual and group fairness. *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 514–524.
- De Dreu, C. K. W., & Gelfand, M. J. (2007). Union–management conflict: Historical trends and new directions. In *The psychology of conflict and conflict management in organizations* (hal. 367–397). Psychology Press.
- Fatmawati, N. I. (2020). Pierre Bourdieu dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 41–60.
- Firdaus, F., Yasin, F., & Anggreta, D. K. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Multikulturalisme Melalui Pendidikan Untuk Menyiasati Masalah Multikultur Di Indonesia & Malaysia. *ASEAN Comparative Education Research Conference (ACER-N 2015)*, 1755–1767.
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18–21.
- Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2009). *Ranah= Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hikam, M. A. S. (2018). Pendidikan Multikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 17(1), 1–17.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 ed.). Sage Publications.
- Nasution, S. I. (2014). Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal Pada Daerah Konflik. *Faculty of Education Universiti Kebangsaan Malaysia*.
- Neuman, G. L. (1991). Whose Constitution? *The Yale Law Journal*, 100(4), 909–991
- Nulhakim,. Konflik Social di Kampung Nelayan: Studi Kasus di Pantai Utara Kota Cirebon, Jawa Barat. *Jurnal Sosiokonsepria Kementrian Sosial Republik Indonesia*. 9(2)
- Putra, R. W. Y. (2014). *Penerapan Pembelajaran Konflik Kognitif Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematis Siswa SMA*. Universitas Pendidikan

Indonesia.

Ward, L. M., Larramendy, D., Arbona, F.,
& Nivesjo, S. (2010). Basque

Country Conflict Map. *University of St. Andrews. Centre for Peace and Conflict Studies.*